

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni proses seleksi partisipan yang dilandasi oleh parameter-parameter spesifik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket langsung di KPP Pratama Semarang Barat, serta secara daring melalui platform Google Form. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Adapun rincian jumlah sampel atau responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	125	100%
Kuesioner Daring	41	32,8%
Kuesioner Luring	84	67,2%
Kuesioner yang dapat diolah	100	80%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	25	20%

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada informasi yang tercantum dalam Tabel 4.1, dapat diidentifikasi bahwa instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada responden berjumlah 125 eksemplar, dimana keseluruhan instrumen tersebut telah dikembalikan oleh para responden penelitian. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa persentase tingkat pengembalian mencapai 100%, yang berarti informasi yang terkumpul telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan proses analisis yang komprehensif. Kuesioner yang telah diterima kemudian diolah dan diklasifikasikan untuk mengetahui profil dan latar belakang para responden secara lebih mendalam. Berikut ini adalah penjabaran hasil dari kuesioner yang telah dianalisis :

4.1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi yang punya NPWP

Tabel 4. 2
Deskripsi Responden Punya NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase
Responden	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2025

4.1.2 Identitas Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 3
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	43	43%
Perempuan	57	57%
Total	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel tersebut, klasifikasi responden berdasar jenis kelamin terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dari keseluruhan 100 partisipan penelitian, terdapat 43 individu (43%) yang berjenis kelamin laki-laki, sementara 57 individu (57%) berjenis kelamin perempuan. Temuan penelitian ini memperlihatkan kalau partisipan

perempuan menunjukkan dominasi yang lebih besar dibandingkan dengan partisipan laki-laki. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran kalau wajib pajak berjenis kelamin perempuan yang punya NPWP dan menjalankan tanggung jawab perpajakan secara aktif di KPP Pratama Semarang Barat menunjukkan level keterlibatan yang lebih tinggi daripada wajib pajak berjenis kelamin laki-laki.

4.1.3 Identitas Usia Responden

Tabel 4. 4
Deskripsi Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
18-25 Tahun	10	10%
25-35 Tahun	55	55%
36-50 Tahun	32	32%
>50 Tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada informasi yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat diidentifikasi kalau komposisi usia partisipan yang ialah wajib pajak terdaftar menunjukkan konsentrasi terbesar pada kategori usia 25–35 tahun dengan jumlah 55 individu (55%). Distribusi selanjutnya meliputi kategori usia 36–50 tahun yang mencapai 32 individu (32%), diikuti oleh kategori usia 18–25 tahun sebanyak 10 individu (10%), sedangkan proporsi terkecil ditempati oleh kategori usia di atas 50 tahun dengan 3 individu (3%). Pola distribusi ini menggambarkan kalau sebagian besar partisipan penelitian terkonsentrasi pada masa usia produktif, terutama dalam kategori usia 25–

35 tahun, yang merepresentasikan populasi wajib pajak yang punya keaktifan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

4.1.4 Identitas Pendidikan Responden

Tabel 4. 5
Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	1	1%
SMP	1	1%
SMA	20	20%
Diploma	17	17%
S1	49	49%
S2	12	12%
Total	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada informasi yang disajikan dalam tabel tersebut, dapat diidentifikasi bahwa partisipan yang tercatat sebagai wajib pajak menunjukkan variasi jenjang pendidikan akhir yang cukup beragam dengan kualifikasi yang relatif tinggi. Distribusi responden meliputi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masing-masing terwakili oleh 1 individu (1%). Selanjutnya, kategori lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 20 individu (20%), lulusan Diploma berjumlah 17 individu (17%), lulusan Strata 1 (S1) mencapai 49 individu (49%), dan lulusan Strata 2 (S2) sebanyak 12 individu (12%). Temuan analisis mengindikasikan kalau sebagian besar partisipan punya kualifikasi pendidikan akhir pada jenjang S1, yang menggambarkan tingkat literasi dan komprehensi yang memadai terhadap tanggung jawab perpajakan.

4.1.5 Identitas Pekerjaan Responden

Tabel 4. 6
Deskripsi Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	23	23%
Karyawan Swasta	26	26%
Wiraswasta	28	28%
Karyawan BUMN/BUMD	23	23%
Total	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam tabel tersebut, dapat diketahui kalau komposisi mata pencaharian responden menunjukkan distribusi yang bervariasi. Kategori wiraswasta menempati posisi teratas dengan jumlah 28 individu atau setara dengan 28% dari total responden. Diikuti oleh kategori karyawan swasta yang mencapai 26 individu atau 26%, sementara kategori Pegawai Negeri Sipil dan karyawan BUMN/BUMD masing-masing terwakili oleh 23 individu atau 23% dari keseluruhan partisipan penelitian.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam rangka memperoleh gambaran menyeluruh terhadap data penelitian, maka diperlukan implementasi pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang diteliti. Prosedur ini mencakup penetapan nilai rata-rata (mean), angka tertinggi (maksimum), angka terendah (minimum), serta standar deviasi dari setiap variabel penelitian yang meliputi Keadilan Perpajakan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi

Perpajakan (X3) dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penggelapan Pajak (Y). Informasi mengenai hasil pengukuran tersebut dapat ditelaah melalui tabel 4.7 yang disajikan berikut ini:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPX	100	10,00	20,00	14,8100	2,47286
SPX	100	15,00	25,00	18,9000	1,99747
DPX	100	4,00	20,00	13,5300	3,04331
PWX	100	4,00	20,00	11,9100	3,27246
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data yang diolah, 2025

Temuan dari analisis deskriptif pada tabel 4.7 diketahui bahwa pada variabel keadilan perpajakan dengan jumlah N (Responden) sebanyak 100 kalau penilaian terendah atas keadilan perpajakan ialah 10 dan nilai tertinggi ialah 20 sehingga mean yang didapat sebesar 14,81 serta standar deviasi sebesar 2,472.

Kemudian data dari analisis pada variabel sistem perpajakan dengan N (Responden) sebanyak 100 kalau penilaian terendah sistem perpajakan berada di angka 15 sedangkan nilai tertinggi berada di angka 25 dan diperoleh mean sebesar 18,90 serta standar deviasi sebesar 1,997.

Selanjutnya, data analisis pada variabel diskriminasi perpajakan dengan N (Responden) sebanyak 100 kalau penilaian terendah diskriminasi perpajakan berada di angka 4 dan penilaian tertinggi berada di angka 20

sedangkan nilai mean diperoleh sebesar 13,53 dan standar deviasi diperoleh sebesar 3,272.

Pada bagian akhir, hasil temuan analisis terhadap variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas penggelapan pajak dengan jumlah N (Responden) sebanyak 100 individu menunjukkan kalau skor minimal dari persepsi wajib pajak orang pribadi atas penggelapan pajak tercatat pada angka 4, sementara skor maksimal berada pada angka 20. Adapun nilai rata-rata (mean) yang diperoleh mencapai 11,91 dengan tingkat standar deviasi yang dihasilkan sebesar 3,272.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Implementasi pengujian validitas bertujuan untuk menjamin kalau instrumen kuesioner yang telah direspons oleh partisipan punya kemampuan yang sesungguhnya dalam melakukan pengukuran terhadap variabel yang jadi target penelitian. Berdasarkan pendapat Ghazali, (2021), pengujian validitas adalah parameter yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap keabsahan suatu instrumen kuesioner. Kriteria validitas instrumen tercapai ketika setiap item pertanyaan dalam variabel mampu merepresentasikan konstruk yang sedang diteliti dengan tingkat akurasi yang tepat.

Uji validitas dapat dilakukan dengan pearson correlation dengan melihat nilai signifikansi apabila menggunakan alpha 5% maka dikatakan

valid apabila nilai signifikansi dibawah 0,05. Selain itu dapat dilihat melalui indikator *df (degree of freedom)* bila nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Validitas Keadilan Perpajakan

No	Variabel	Pertanyaan	<i>Sig-2 Tailed</i>	Taraf Signifikan	Keterangan
1	Keadilan Perpajakan	X1.1	0,000	0,05	Valid
		X1.2	0,000	0,05	Valid
		X1.3	0,000	0,05	Valid
		X1.4	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada temuan dari pengolahan data melalui pengujian validitas pada variabel Keadilan Perpajakan yang terdiri dari 4 item pertanyaan, dapat diidentifikasi kalau seluruh item pertanyaan memenuhi kriteria validitas. Hal ini ditunjukkan melalui kondisi dimana tingkat signifikansi yang mencapai 0,000 dan berada di bawah ambang batas 0,05. Kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa setiap indikator pertanyaan yang terdapat dalam variabel Keadilan Perpajakan dapat dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan

No	Variabel	Pertanyaan	<i>Sig-2 Tailed</i>	Taraf Signifikan	Keterangan
1	Sistem Perpajakan	X2.1	0,000	0,05	Valid
		X2.2	0,000	0,05	Valid
		X2.3	0,003	0,05	Valid
		X2.4	0,000	0,05	Valid
		X2.5	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada temuan dari proses pengolahan data melalui pengujian validitas terhadap variabel Sistem Perpajakan yang terdiri dari 5 item pertanyaan dibuktikan melalui hasil dimana tingkat signifikansi yang tercatat sebesar 0,000 dan berada di bawah batas 0,05. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditetapkan kesimpulan kalau setiap indikator pertanyaan yang terkandung dalam variabel Sistem Perpajakan dapat dikategorikan sebagai item yang Valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas Diskriminasi Perpajakan

No	Variabel	Pertanyaan	<i>Sig-2 Tailed</i>	Tarif Signifikan	Keterangan
1	Diskriminasi Perpajakan	X1.1	0,000	0,05	Valid
		X1.2	0,000	0,05	Valid
		X1.3	0,000	0,05	Valid
		X1.4	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada temuan dari proses analisis data melalui pengujian validitas terhadap variabel Diskriminasi Perpajakan yang punya 4 item pertanyaan, dapat diidentifikasi kalau seluruh item pertanyaan memenuhi kriteria validitas. Hal ini dibuktikan melalui hasil yang menunjukkan tingkat signifikansi yang mencapai 0,000 dan berada di bawah batas 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditetapkan konklusi bahwa setiap indikator pertanyaan yang terdapat dalam variabel Diskriminasi Perpajakan

dapat dikategorikan sebagai item yang Valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Validitas Persepsi WPOP Atas Etika Penggelapan Pajak

No	Variabel	Pertanyaan	<i>Sig-2 Tailed</i>	Taraf Signifikan	Keterangan
1	Persepsi WPOP Atas Etika Penggelapan Pajak	X1.1	0,000	0,05	Valid
		X1.2	0,000	0,05	Valid
		X1.3	0,000	0,05	Valid
		X1.4	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada temuan dari proses analisis data melalui pengujian validitas terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak yang terdiri dari 4 item pertanyaan, dapat diketahui bahwa keseluruhan item pertanyaan memenuhi standar validitas. Kondisi ini diverifikasi melalui hasil yang memperlihatkan tingkat signifikansi yang tercatat pada angka 0,000 dan berada di bawah ambang batas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditetapkan kesimpulan bahwa setiap indikator pertanyaan yang terkandung dalam variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak dapat dinyatakan sebagai item yang Valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan pendapat Ghazali (2021), pengujian reliabilitas berfungsi sebagai parameter untuk mengevaluasi tingkat konsistensi yang dimiliki oleh instrumen kuesioner dalam melakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang terdapat pada suatu variabel penelitian. Sebuah

kuesioner dinyatakan reliabel apabila hasil pengukuran yang diperoleh konsisten meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Artinya, jika seseorang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu pada suatu waktu, maka jawaban tersebut akan relatif sama ketika diulang dalam waktu berbeda, selama kondisi tidak berubah. Dalam rangka mengidentifikasi tingkat reliabilitas dari instrumen kuesioner, prosedur pengujian diimplementasikan melalui pendekatan metode Cronbach's Alpha. Kriteria reliabilitas instrumen tercapai ketika nilai Cronbach's Alpha menunjukkan angka yang melebihi 0,70. Berikut ini ditampilkan temuan hasil pengujian reliabilitas terhadap tiga variabel yang jadi objek penelitian:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Reliabilitas

No	Keterangan	Cronbach's Alpha	Standar Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Keadilan Perpajakan	0,785	>0,7	Reliabel
2	Sistem Perpajakan	0,745	>0,7	Reliabel
3	Diskriminasi Perpajakan	0,741	>0,7	Reliabel
4	Persepsi WPOP atas Etika Penggelapan Pajak	0,846	>0,7	Reliabel

Sumber : Data yang diolah, 2025

Mengacu pada temuan pengujian reliabilitas yang disajikan dalam tabel tersebut, diperoleh angka Cronbach's Alpha untuk setiap variabel penelitian dengan rincian variabel Keadilan Perpajakan mencapai 0,755, variabel Sistem Perpajakan menunjukkan angka 0,738, variabel Diskriminasi Perpajakan memperoleh nilai 0,708, dan variabel Persepsi

Wajib Pajak Orang Pribadi atas Etika Penggelapan Pajak mencatat angka 0,770. Keseluruhan angka tersebut menunjukkan posisi yang melampaui ambang batas minimal 0,70 sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ghozali, (2021), sehingga dapat ditetapkan konklusi bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner pada setiap variabel punya derajat reliabilitas yang memadai dan menunjukkan konsistensi yang baik. Artinya, setiap butir pertanyaan di dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara stabil, dan apabila diberikan kembali dalam waktu yang berbeda, maka hasil yang diperoleh dari responden cenderung akan tetap konsisten.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Salah satu uji yang diperlukan sebelum melakukan pengujian hipotesis atau analisis adalah uji normalitas. Tujuan dari pengujian data ini adalah untuk memastikan apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Berdasarkan pendapat Ghozali (2021), grafik yang digunakan dalam pengujian normalitas mungkin tampak normal pada temuan pertama, tetapi mungkin tidak akurat secara statistik. Maka dari itu, peneliti melakukan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan dalam kajian ini untuk mengevaluasi normalitas data residual. Kriteria guna uji normalitas ini ialah:

- Apabila nilai Sig. < 0,05, maka residual tidak mengikuti distribusi normal.

- Apabila nilai Sig. > 0,05, maka residual mengikuti distribusi normal.

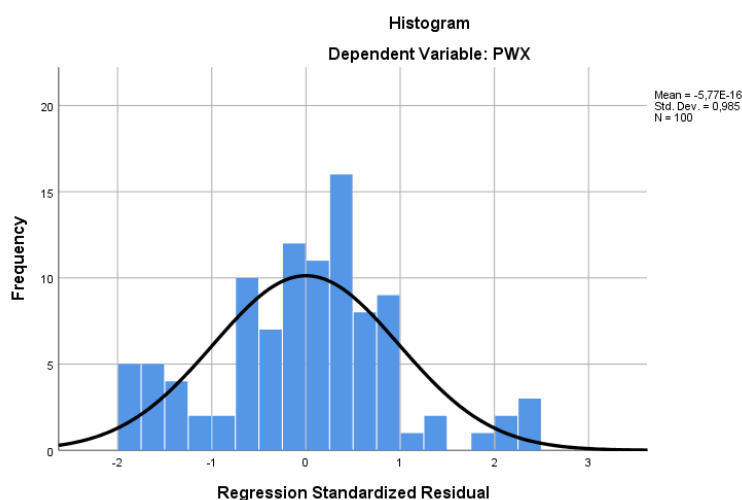
Tabel 4. 13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,72942042
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,071
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Mengacu pada temuan pengujian normalitas melalui metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang tercantum dalam tabel tersebut, dapat diidentifikasi kalau angka K-S terhadap variabel residu mencapai 0,071 disertai dengan derajat signifikansi yang mencapai 0,200. Mengingat angka signifikansi menunjukkan nilai yang melebihi $\alpha = 0,05$, maka dapat ditetapkan kesimpulan kalau data residual dalam riset ini punya distribusi yang normal dan hipotesis nol (H_0) dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan asumsi normalitas, yang merupakan salah satu persyaratan

fundamental dalam prosedur analisis regresi. Selain itu, normalitas data juga didukung oleh visualisasi histogram pada Gambar 4.1 yang memperlihatkan bentuk kurva menyerupai distribusi normal, yakni berbentuk lonceng (*bell-shaped curve*). Pola distribusi tersebut mengindikasikan kalau residual tersebar secara simetris di sekitar nilai tengah, memperkuat kesimpulan kalau asumsi normalitas terpenuhi.

Gambar 4. 1
Grafik Kurva K-S



Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar data terletak di dalam kurva, dengan hanya sedikit data yang berada di luar kurva, yang menunjukkan kalau distribusi data bersifat normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen yang termasuk dalam model regresi terkait dengan variabel tambahan. Variabel-variabel independen dalam

model regresi yang baik tidak seharusnya punya korelasi yang signifikan satu sama lain (juga dikenal sebagai koefisien korelasi). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis nilai VIF dan *Tolerance*. Nilai *Tolerance* yang diatas dari atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF yang lebih rendah dari atau sama dengan 10 adalah batas ambang yang digunakan guna mengidentifikasi multikolinearitas (Ghozali, 2021). Dalam tabel berikut, yang dapat dilihat di bawah ini, hasil uji multikolinearitas disajikan :

Tabel 4. 14
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistic</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0,852	1,174	Non Multikolinearitas
X2	0,876	1,141	Non Multikolinearitas
X3	0,970	1,030	Non Multikolinearitas

Sumber : Data yang diolah, 2025

Diketahui bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini punya nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) kurang dari 10. Informasi ini diperoleh dari perhitungan yang ditampilkan dalam Tabel 4.13. Fakta ini menunjukkan kalau model regresi yang digunakan tidak mengandung multikolinearitas di antara variabel independen. Dengan kata lain, setiap variabel independen dalam penelitian ini bersifat independen atau tidak bergantung pada variabel lain secara linier. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau model regresi linier

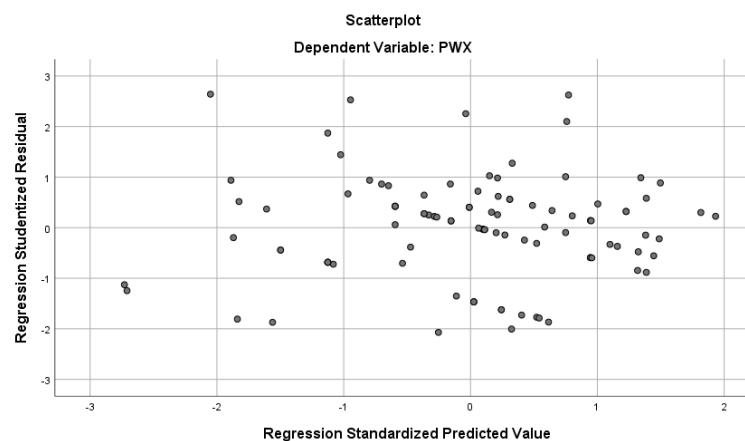
berganda yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi tradisional tentang multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah residu yang dihasilkan dari setiap pengamatan dalam model regresi punya varians yang tidak sama atau tidak sebanding dengan varians residu lainnya. Ketika varians residu tidak berubah dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, fenomena ini disebut homoskedastisitas. Di sisi lain, ketika varians berubah, fenomena ini disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Berikut adalah presentasi hasil uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 :

Gambar 4. 2

Hasil Uji Heterokedasitas



Gambar 4.2 tidak menunjukkan pola yang jelas, karena menampilkan titik-titik yang tersebar di bawah dan di atas garis nol pada

sumbu Y. Akibatnya, model regresi ini cocok untuk memprediksi variabel dependen, yakni persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah keadilan, sistem, dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas yang terdapat dalam regresi.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel yang termasuk dalam studi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel independen (X1, X2, dan X3) dan variabel yang diteliti (Y).

Tabel 4. 15
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	9,295	2,962		3,138	0,002
	KPX	-0,671	0,122	-0,507	-5,501	0,000
	SPX	0,383	0,149	0,234	2,572	0,012
	DPX	0,393	0,093	0,365	4,228	0,000
a Dependent Variable: PWX						

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda yang ditunjukkan pada Tabel 4.14 dan fakta kalau SPSS versi 26.0 versi Windows digunakan, berikut adalah rumus persamaan regresi:

$$Y = 9,295 - 0,671X_1 + 0,383X_2 + 0,393X_3 + e$$

Dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda yang telah ditunjukkan sebelumnya, dapat ditentukan bahwa :

- a. Koefisien regresi variabel keadilan perpajakan bernilai negatif sebesar -0,671. Artinya, apabila persepsi responden terhadap keadilan perpajakan meningkat 1 poin skala, maka persepsi etis terhadap penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,671 poin. Dengan kata lain, semakin adil sistem pajak yang dirasakan wajib pajak, maka mereka akan semakin menolak penggelapan pajak secara etis.
- b. Koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan sebesar +0,383, dapat disimpulkan kalau jika terdapat peningkatan satu poin dalam persepsi terhadap sistem perpajakan, maka akan terjadi peningkatan sebesar 0.383 poin dalam persepsi etis terhadap penghindaran pajak. Mungkin terdapat ketidakseimbangan antara fitur teknis sistem perpajakan dan perasaan keadilan atau kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini karena anggapan kalau penggelapan pajak adalah tindakan etis juga meningkat, meskipun sistem perpajakan dianggap lebih baik.
- c. Koefisien regresi variabel diskriminasi perpajakan sebesar +0,393. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa jika ada peningkatan satu poin dalam persepsi diskriminasi pajak, maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,393 poin dalam pandangan kalau

penggelapan pajak jadi tindakan etis. Akibatnya, kemungkinan wajib pajak membenarkan penggelapan pajak sebagai tindakan etis meningkat seiring dengan tingkat diskriminasi yang mereka rasakan dalam sistem perpajakan.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Secara esensial, uji t-statistik digunakan untuk menentukan sejauh mana variabel penjelas tunggal, yang juga dikenal sebagai variabel independen, dapat menjelaskan variasi pada variabel yang diuji (Ghozali, 2021). Tabel 4.15, yang berisi hasil uji t dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4. 16
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	9,295	2,962		3,138	0,002
	KPX	-0,671	0,122	-0,507	-5,501	0,000
	SPX	0,383	0,149	0,234	2,572	0,012
	DPX	0,393	0,093	0,365	4,228	0,000
a Dependent Variable: PWX						

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas dapat diketahui:

- a. Nilai signifikansi untuk Variabel Keadilan Perpajakan (X1) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Variabel Keadilan Perpajakan (X1) punya pengaruh yang signifikan

terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y).

- b. Nilai signifikansi untuk Variabel Sistem Perpajakan (X2) adalah 0,012, yang juga lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa Variabel Sistem Perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y).
- c. Nilai signifikansi untuk Variabel Diskriminasi Perpajakan (X3) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau Variabel Diskriminasi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y).

4.2.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan pendapat Ghozali (2021), jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai F yang terdapat dalam tabel atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen punya pengaruh terhadap variabel dependen, baik secara kolektif maupun bersamaan. Hasil uji F ditampilkan dalam Tabel 4.16, yang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4. 17
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	322,666	3	107,555	14,000	,000 ^b
	Residual	737,524	96	7,683		
	Total	1060,190	99			
a. Dependent Variable: PWX						
b. Predictors: (Constant), DPX, SPX, KPX						

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan analisis variansi (ANOVA) atau uji F, nilai F yang ditentukan ialah 14.000, dan probabilitasnya ialah 0,000. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan kalau satu atau semua variabel signifikan, atau dapat dikatakan kalau Keadilan Pajak, Sistem Pajak, dan Diskriminasi Pajak adalah satu atau semua variabel yang secara signifikan mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, yang merupakan ambang batas di mana statistik dianggap signifikan.

4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Dalam bentuknya yang paling sederhana, koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik model menggambarkan

fluktuasi pada variabel yang dijelaskan. Guna menentukan koefisien determinasi, perlu melihat nilai R Square pada tabel analisis.

Tabel 4. 18
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,552 ^a	0,304	0,283	2,77174	1,793
a. Predictors: (Constant), DPX, SPX, KPX					
b. Dependent Variable: PWX					

Sumber : Data yang diolah, 2025

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai R Square yang disesuaikan adalah 0,283 berdasarkan hasil koefisien determinasi. Hal ini dapat diamati dengan melihat tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yakni Keadilan Pajak (X1), Sistem Pajak (X2), dan Diskriminasi Pajak (X3), mampu menjelaskan 28,3 persen variasi pada variabel yang dikenal sebagai Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas Etika Penggelapan Pajak (Y). Sementara itu, sisa 71,7% mungkin dijelaskan oleh variabel tambahan yang tidak termasuk dalam model yang dianalisis.

4.3 Intrepretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak

Pengaruh negatif keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak dipresentasikan sebagai hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini. Mengingat variabel

keadilan pajak punya nilai t sebesar -5.501 dan koefisien regresi sebesar -0.671 dengan nilai signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari ($\alpha = 0.05$), jelas bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima atau terbukti.

TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan atas hasil dari perilaku tersebut. Jika wajib pajak memandang bahwa sistem pajak dijalankan secara adil dan proporsional, maka mereka akan mengembangkan sikap negatif terhadap tindakan penggelapan pajak karena dianggap tidak etis. Dalam penelitian ini, keadilan pajak membentuk *behavioral beliefs* yang memengaruhi sikap wajib pajak terhadap perilaku tidak patuh.

Keadilan pajak yang mempunyai dampak negatif terhadap pandangan wajib pajak tentang penggelapan pajak didukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan *et al.*, (2021). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk membenarkan penggelapan pajak secara moral. Dengan demikian, aspek keadilan perpajakan merupakan faktor penting yang harus dijaga dalam meningkatkan etika perpajakan di masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hipotesis kedua yang dikemukakan dalam riset ini, terdapat pengaruh negatif dari sistem perpajakan terhadap pandangan wajib

pajak individu mengenai etika penggelapan pajak. Bukti empiris dari pengujian statistik menunjukkan hasil yang mendukung proposisi tersebut, dengan nilai t yang tercatat sebesar 2.572 dan koefisien regresi mencapai 0.383. Tingkat signifikansi yang diperoleh ialah 0.012, angka ini berada di batas bawah ($\alpha = 0.05$), sehingga hipotesis pertama dalam studi ini dapat ditolak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), hasil temuan positif dan bermakna dari sistem perpajakan semakin baik terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi, sebagian wajib pajak tetap melakukan penggelapan karena memiliki keyakinan bahwa tindakan tersebut memberikan keuntungan tertentu. Selain itu, jika mereka merasa memiliki kendali atas situasi, misalnya karena lemahnya pengawasan atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan, maka niat untuk melakukan penggelapan pajak tetap muncul, meskipun kualitas sistem perpajakan sudah meningkat. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, dengan keberhasilan yang bergantung pada pengetahuan, pemahaman, dan integritas wajib pajak.

Hasil riset ini punya keselarasan dengan studi yang dilakukan oleh (Azis et al., 2022) dan (Kurnia & Faisal, 2022) dimana kedua penelitian tersebut juga mengkonfirmasi adanya dampak positif dan substansial dari sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Jika masyarakat melihat sistem perpajakan berjalan dengan baik dan konsisten, maka kepercayaan

mereka terhadap pemerintah akan meningkat, dan hal ini bisa mencegah atau mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

4.3.3 Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini, ditemukan bahwa diskriminasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Temuan ini dibuktikan melalui analisis statistik yang menunjukkan variabel diskriminasi perpajakan mencapai nilai t hitung 4,228 dengan koefisien regresi 0,393, serta tingkat signifikansi 0,000 yang berada di bawah batas kritis ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang dirumuskan dalam studi ini dapat diterima dan terbukti kebenarannya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa diskriminasi perpajakan secara faktual mempengaruhi cara pandang wajib pajak orang pribadi terhadap aspek etika penggelapan pajak dalam arah yang positif. Implikasinya adalah ketika intensitas diskriminasi yang dirasakan wajib pajak meningkat baik yang bersumber dari aspek ras, keyakinan agama, perbedaan budaya, maupun stratifikasi sosial maka kecenderungan mereka guna menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang dapat dibenarkan secara moral juga akan bertambah besar.

Temuan riset ini punya kesesuaian dengan kerangka *Theory of Planned Behavior*, khususnya pada aspek *normative beliefs* di mana

orientasi sikap individu akan terbentuk berdasar keyakinan mereka terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Pengalaman mengalami diskriminasi sebagai wajib pajak dapat menimbulkan sikap tidak suka terhadap sistem perpajakan, yang kemudian mendorong munculnya niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil ini memperkuat argumentasi kalau prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan sistem perpajakan adalah komponen fundamental dalam membangun tingkat kepatuhan dan moralitas perpajakan yang kokoh di tengah masyarakat.

Validitas temuan penelitian ini mendapat dukungan dari sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Putri Kharisma Mochtar et al., 2024), (Ikhsan et al., 2021), (Fitria, 2023) serta (Kurnia & Faisal, 2022) yang mengkonfirmasi bahwa diskriminasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap pandangan wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kondisi ini menggambarkan bahwa diskriminasi mampu menggerus tingkat kepercayaan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.